

Wali Kota Bogor Minta Pengelola Perbaiki Tata Kelola Parkir Sepeda Listrik

BOGOR (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah melakukan evaluasi terhadap pengelola sepeda listrik, PT Beam, terkait penempatan sepeda dan skuter listrik yang mengganggu jalur pejalan kaki. PT Beam diminta untuk memperbaiki koordinat penempatan sepeda dan menambah personel untuk patroli.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengatakan Pemkot Bogor melakukan evaluasi tersebut pada Senin (24/10) usai pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat. Bima Arya mengakui, persoalan yang juga dihadapi ialah banyak warga pengguna sepeda dan skuter listrik tersebut belum memahami jika penempatan kendaraan-kendaraan listrik itu sudah ada koordinatnya. Sehingga, seharusnya penempatan atau titik parkir kendaraan listrik tersebut tidak dilakukan secara sembarangan.

"Tetapi saya minta Beam menambah personel untuk menyapu, patroli, kalau ada sepeda yang ditaro sembarangan itu harus digeser. Saya ultimatum dalam jangka waktu satu minggu, persoalan sudah selesai," kata Bima Arya, Selasa (25/10).

Di samping itu, Bima Arya juga meminta PT Beam untuk memperbaiki koordinat penempatan kendaraan listrik, serta melakukan sosialisasi kepada warga agar warga paham bagaimana cara menggunakannya.

"Ini masih uji coba. Alhamdulillah tidak ada laporan

kecelakaan, tetapi terus kita perbaiki karena inikan pertama di Indonesia. Tapi sambutannya luar biasa. Weekend kemarin saja mencatat rekor satu hari ada 900 pengguna," paparnya.

Ke depan, Bima Arya berharap sepeda dan skuter listrik tersebut bisa mengkonksikan titik destinasi wisata. Seperti di seputar Sistem Satu Arah (SSA), Mal Botani Square, Kebun Raya Bogor, dan kawasan Suryakencana.

Kedua, kata dia, dalam jangka menengah dan jangka panjang, kendaraan listrik ini bisa dijadikan transportasi feeder. Sehingga, mempermudah mobilitas perkotaan, bukan hanya di ranah wisata.

"Sekarang ini masih terbatas jalur sepeda di pusat kota. Sejauh ini belum ada laporan kecelakaan Alhamdulillah tapi kita terus pantau itu," tuturnya.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Eko Prabowo, mengatakan pihaknya juga melakukan pengawasan penggunaan sepeda dan skuter listrik ini. Sebab, ia sendiri sempat menemui pengguna kendaraan listrik yang tidak berjalan di jalur khusus sepeda.

"Yang diperbolehkan dalam Permenhub 45/2020, itu adalah jalur-jalur khusus, tempat-tempat khusus yang memang secara Perwali atau SK Wali Kota titik mana yang diizinkan oleh Wali Kota gitu," kata Eko. ● **gio**

RPD 2024-2026 Bisa Jadi Pedoman

Keberlangsungan Pembangunan Masa Transisi

BOGOR (IM)- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin menyatakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bisa jadi pedoman keberlangsungan pembangunan selama masa transisi.

Hal ini dikatakannya saat memberi arahan pada Forum Perangkat Daerah Rancangan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor tahun 2024-2026, di Alun-alun Ciriimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (25/10).

Kegiatan diisi narasumber, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II, Kiagoos Egie Ismail. Tim Percepatan Pembangunan Kegiatan Pembangunan Strategis (TP2S), Yayat Supriatna.

Burhanudin menjelaskan, RPD yang disusun untuk 2024-2026 ini selanjutnya diturunkan dalam Renstra PD, bisa menjadi pedoman bagi pejabat bupati selama masa transisi. RPD ini juga bisa disesuaikan lebih lanjut saat terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bogor, karena nanti ada janji-janji bupati yang terpilih yang harus masuk.

"Saya selalu katakan RPD yang dibuat hari ini bisa dilanjutkan lima tahun kedepan setelah terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Bogor," jelas Burhanudin.

Ia menambahkan, jadi selain sebagai pedoman keberlangsungan pembangunan, juga sebagai pedoman dalam

menyusun RPJMD 2025 – 2029. Dan akhir tahun ini harus sudah selesai, karena nantinya akan disahkan dalam bentuk Perda.

Burhanudin juga mengungkapkan dirinya mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Forum Perangkat Daerah DPKPP yang dilaksanakan berbeda dari yang lainnya. Menurutnya DPKPP hari ini berinovasi dengan melaksanakan kegiatan Forum Perangkat Daerah di Alun-alun Ciriimekar.

"Sebetulnya tidak harus melalui di hotel, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah ini bisa dilaksanakan di wilayah, salah satunya di tempat wisata," ujar Burhanudin.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, ini adalah Renstra transisi karena Bupati dan Wakil Bupati Bogor akan ditetapkan pada Maret 2025.

"Jadi tahun 2024 hingga 2026 itu DPKPP punya tantangan, salah satunya yakni pengerjaan hunian tetap bagi korban bencana alam," kata Ajat.

Ajat berharap, mudah-mudahan apa yang dilakukan di DPKPP ini kedepan bisa memberikan ruang-ruang publik yang tujuannya mewujudkan Indonesia yang bermartabat. Jadi ada istilahnya membangun struktur untuk merubah kultur. ● **gio**

Tangga Besi Rusak, JPO Paledang

Arah Stasiun Bogor Ditutup

BOGOR (IM)- Jembatan penyeberangan Orang (JPO) Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor yang mengarah ke Stasiun Bogor mengalami kerusakan pada tangga besi. Sisi tangga besi yang sudah keropos tersebut pun ditutup untuk sementara waktu.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengaku telah menerima berbagai keluhan warga terkait kerusakan di JPO tersebut baik secara langsung, melalui media sosial, maupun dari aplikasi SiBadra.

"Karena saya sudah lama nggak naik jembatan itu, saya tadi coba naik memang ada bagian yang sangat membahayakan. Sudah keropos," kata Bima Arya di lokasi, Selasa (25/10).

Bima Arya mengatakan, setelah meninjau dengan Kepala Stasiun Bogor, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, dan Camat Bogor Tengah, disepakati tangga besi tersebut ditutup untuk sementara waktu. Sebab, sisi tersebut dinilai bahaya untuk dilewati.

"Jadi bagian itu karena bahaya kita tutup untuk kemudian

warga diarahkan untuk menggunakan tangga beton. Jadi itu jangka pendeknya. Sembari mungkin nanti Dishub akan memperbaiki untuk sementara," ujarnya.

Kepala Dishub Kota Bogor, Eko Prabowo, mengatakan penutupan tangga besi di JPO Paledang dilakukan mulai hari ini. Penutupan dilakukan oleh Stasiun Bogor menggunakan rantai, sementara Dishub Kota Bogor akan memasang rambu. "Tadi kita lihat sudah keropos namanya dari besi dan itu kan sudah dibuat dari tahun berapa. Tadi sudah disampaikan Pak Wali rencana jangka pendek ditutup, menengahnya kita perbaiki. Apa yang bisa kita perbaiki di situ," kata Eko.

Dia menambahkan, nantinya di JPO Paledang akan dikerahkan petugas untuk mengarahkan pejalan kaki dan pengguna kereta agar tidak melalui tangga tersebut. "Berarti diarahkan dengan rambu dan sebagainya. Karena jalur pedestrian kiri kanannya akan diperbaiki oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI)," ujarnya. ● **jay**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

HISTORICAL WALK PIMPINAN MPR OKI

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (keenam kiri), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kelima kiri) dan perwakilan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengikuti "Historical Walk" dalam rangkaian Konferensi Internasional di Bandung, Jawa Barat, Selasa (25/10). Konferensi Pimpinan MPR Negara-negara OKI tersebut merupakan pertemuan internasional untuk membahas forum MPR dalam mewujudkan perdamaian dunia dan penguatan parlemen dari negara-negara Islam.

BIG Siap Dampingi BPBD Kab. Bogor untuk Buat Peta Sebaran Rawan Bencana Alam

BIG siap mendampingi BPBD Kabupaten Bogor, dan bisa membuat peta sebaran rawan bencana alam dengan menggunakan peta sistem lahan. Seharusnya BPBD Kabupaten Bogor sudah memiliki peta sebaran rawan bencana alam, hingga langkah mitigasi bisa lebih tepat, kata Kepala BIG, Muhammad Aris Marfai.

BOGOR (IM)- Badan Informasi Geospasial (BIG) siap berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor untuk membuat peta sebaran rawan bencana alam.

Kepala BIG, Muhammad Aris Marfai mengaku siap mendampingi BPBD Kabupaten Bogor dalam membuat

peta tematik sebaran rawan bencana alam.

Peta sebaran rawan bencana alam tersebut kata Muhammad Aris Marfai bisa berdasarkan peta sistem lahan yang sudah dibuat BIG sebelumnya.

"BIG siap mendampingi BPBD, dan mereka bisa membuat peta sebaran rawan ben-

cana alam dengan menggunakan peta sistem lahan. Selain mendampingi, petugas BIG juga bisa mengasistensi dalam melakukan pemetaan sebaran rawan bencana alam hingga peta tersebut termasuk kebijakan satu peta yang dicanangkan oleh pemerintah pusat pada Tahun 2016 lalu," kata Muhammad Aris Marfai kepada wartawan, Selasa (25/10).

Mantan Dekan Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada (UGM) ini menerangkan bahwa peta sebaran rawan bencana alam tersebut sangat penting, apalagi beberapa hari ini, Kabupaten Bogor tertimpa bencana alam tanah longsor dan banjir.

"Harusnya BPBD Kabupaten Bogor sudah memiliki peta sebaran rawan bencana alam, hingga langkah mitigasi

bisa lebih tepat," terangnya.

Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama BIG, Suprajaka menambahkan bahwa jajarannya sudah melakukan simpul jaringan atau pemetaan kepada tenaga surveyor pemetaan. Walaupun BPBD membuat sendiri peta sebaran rawan bencana alam, namun karena tenaga surveyor pemetaan merupakan binaan BIG, maka peta tersebut termasuk ke dalam kebijakan satu peta," tambah Suprajaka.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menagih peta sebaran rawan bencana alam ke BPBD. Dengan peta sebaran rawan bencana alam tersebut, maka diharapkan BPBD sejak jauh hari sudah bisa melakukan langkah-langkah mitigasi atau pencegahan bencana alam.

"Kabupaten Bogor ini topografi wilayahnya berbeda-beda, ada dataran, lembah, bukit hingga pegunungan yang dimanapun bisa terjadi bencana alam. Hingga kita butuh peta sebaran bencana alam," ucap Rudy Susmanto.

Rudy Susmanto melanjutkan setelah dibuat peta sebaran rawan bencana alam, langkah BPBD selanjutnya bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) membentuk relawan desa tangguh bencana (Destana).

"Kami mendukung BPBD dan DPMD membentuk relawan Destana, dengan peta sebaran rawan bencana, maka latihlah para relawan dengan potensi bencana alam yang ada di desanya, hingga secara mandiri, mereka juga bisa melakukan mitigasi atau pencegahan," lanjutnya. ● **gio**

Pemkab Bogor Bersinergi dengan TP-PKK Tanggap dan Tangguh Bencana

BOGOR (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersinergi dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bogor, meluncurkan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Tingkat Kabupaten Bogor Tahun 2022, di Gedung Serbaguna I Setda, Senin (24/10).

Hal itu sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Bogor, guna menciptakan keluarga Kabupaten Bogor paham dan sadar mitigasi bencana untuk mengurangi resiko akibat bencana.

Wilayah Kabupaten Bogor secara hidrografis terdapat sembilan aliran sungai dan tofografi cukup labil, sehingga berpotensi rawan bencana longsor dan angin kencang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin menyambut baik peluncuran atau launching keluarga sehat dan tangguh bencana di Kabupaten Bogor.

Tentunya keluarga jadi berpengetahuan, sadar dan mengenali resiko bencana, baik bencana alam maupun non alam sehingga mampu menghindarkan diri dari bencana.

"Saya minta semua pihak mulai dari SKPD BPBD, Kabupaten Bogor Tahun 2022, di Gedung Serbaguna I Setda, Senin (24/10).

Ketua TP-PKK Kabupaten Bogor, Halimatusadiyah Iwan menyatakan, gerakan keluarga sehat dan tangguh bencana agar keluarga serta mewujudkan keluarga dan lingkungan yang sehat adalah salah satu tujuan dari program PKK bidang kesehatan, kelestarian lingkungan dan perencanaan sehat.

Sudah barang tentu peran PKK pada pembangunan tidak boleh diabaikan baik di tingkat daerah maupun ditingkat na-

sional, bahkan bisa dikatakan menjadi ujung tombak pelaksanaan program kegiatan.

PKK juga senantiasa berupaya selain menciptakan keluarga sehat dan tangguh bencana, juga melakukan keluarga peduli stunting, peduli lingkungan untuk melahirkan keluarga Kabupaten Bogor yang sehat.

"Melalui momentum ini, saya mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung kegiatan gerakan keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana, serta mendukung terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur sehat sejahtera lahir dan batin," tukas Ketua TP-PKK itu.

Karenanya, perlu kesadaran seluruh masyarakat dan semua unsur dalam membangun kesiapsiagaan dan tangguh bencana mulai dari tingkat keluarga dan masyarakat sebagai salah satu upaya mitigasi bencana. ● **gio**

Bongkar TPPO, Kapolres Bogor Peroleh Penghargaan KPAI



15T

Kapolres Bogor, AKBP DR Iman Imanudin menerima penghargaan KPAI karena berhasil membongkar TPPO.

BOGOR (IM)- Kapolres Bogor, AKBP DR Iman Imanudin menerima penghargaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) karena berhasil membongkar Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berka-mufase yasan sejuta anak, baru-baru ini.

Seperti diketahui, Polres Bogor menangkap Suhendra pada akhir September 2022. Suhendra diduga melakukan TPPO sejak awal tahun 2022.

Suhendra dalam menjalankan aksinya menggunakan kedok yasan bernama Ayah Sejuta Anak, dengan menampung para ibu hamil yang tak bersuami.

Oleh karena itu, KPAI memberikan penghargaan kepada Polres Bogor yang berhasil mengungkap kasus perdagangan orang berkedok yasan sejuta anak beberapa waktu lalu.

Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh ketua KPAI, Arist Merdeka Sirait kepada Kapolres Bogor, AKBP Dr. Iman Imanudin SH SIK MH, dan Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Siswo de cuellar Tarigan SH

SIK dalam acara peringatan HUT Komnas perlindungan Anak Ke 24 serta HUT Polisi Selebriti ke 4 di hotel Grandhika Iskandarsyah Jakarta Selatan, Senin malam (24/10).

Ketua KPAI Arist Merdeka Sirait mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi atas pengungkapan yang berhasil dilakukan oleh jajaran Polres Bogor terkait kasus TPPO ayah sejuta anak. Begitu banyak anak-anak dan orang hamil yang dapat terselamatkan atas pengungkapan kasus ini, ungkapnya.

Atas penghargaan ini, Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanudin sangat berterima kasih karena mendapat kepercayaan dan penghargaan yang diberikan KPAI.

"Kami mengucapkan terimakasih atas semua pihak yang juga telah mensupport keberhasilan dalam pengungkapan kasus TPPO ini," ujar Imanudin.

Ia menilai, pemberian penghargaan ini akan menjadi sebuah motivasi bagi diri dan jajarannya untuk terus memperbaiki diri agar bisa memberikan Pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. ● **gio**



15T

Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin bersama Ketua TP-PKK Kabupaten Bogor, Halimatusadiyah Iwan bersinergi dengan Pemkab Bogor.